

## GELIAT POLITIK ISLAM LOKAL DI INDONESIA TAHUN 1998-2021: STUDI POLITIK ISLAM DAERAH KEDIRI, ACEH DAN SUMENEP

\*<sup>1</sup>Ratih Himamatul Azizah T

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

[\\*ratihlucu23@gmail.com](mailto:*ratihlucu23@gmail.com)

### Artikel History

Submit: 10 Januari 2021

Review: 24 Februari 2021

Revised: 6 April 2021

Accepted: 21 Mei 2021

**Abstract:** This article examines Islamic political governance in Indonesia. Islamic political revival began in the reform era. Reform era provides democratic space for national political parties and local political parties in exploring democracy in the regions. Islamic politics in the region has different forms in carrying it out and does not lose the side of locality because it is in accordance with the socio-cultural conditions of the local community. Islamic politics in kediri by adjusting the socio-cultural condition the people *tidak keagetan* so that the form of Islamic politics kediri is an tolerant. Politics Islamic in sumenep ethnic islam politics with the philosophy "*bhuppa', bbabu', guru, rato*" the from of leadership respect the *kiai* as a teacher and rules. Islamic politics in aceh with characteristics maintains Islamic politics in accordance with Allah provisions.

**Keywords:** : Islamic politics, localitas, policy, public

### Pendahuluan

Kemunculan politik Islam merupakan hasil dari terombang ambingnya hubungan antara islam dan kepemimpinan Negara yang otoriter pada era orde baru. Politik islam menjadi tonggak pergerakan masyarakat islam dalam mendirikan sitem politik sesuai dengan ajaran islam. Fenomena munculnya politik islam yang menjamur di seluruh masyarakat Indonesia pasca orde baru membuka keran demokrasi dan memperkuat peluang komunalisme yang memiliki kepentingan untuk membentuk politik islam. Fenomena politik islam di Indonesia terjadi secara transisional dari periode ke periode karena adanya ancaman rezim yang menimbulkan kekerasan, korban jiwa, harta serta tempat peribadatan. Pada masa orde baru dengan rezim otoriter menjadikan masyarakat tidak dapat mengekspresikan keinginan politik mereka.

Orde baru merupakan kekuasaan yang dipimpin oleh presiden soeharto dimana kepemimpinannya bersifat otoriter. Kepemimpinan tersebut menjadikan masyarakat kesulitan untuk bernafas karena semua sudah diatur dan ditentukan oleh Negara. Hal tersebut berlanjut sampai dengan 32 tahun kepemimpinan presiden soeharto. Pada

tahun 1998 terjadilah gejolak politik hebat di Indonesia yakni aksi demo besar-besaran untuk melengserkan presiden soeharto. Setelah kudeta terjadi reformasi pun di jalankan di Indonesia. Perubahan struktur kekuasaan dalam kepemimpinan selalu memberikan perubahan sosial,ekonomi,politik dan budaya dalam masyarakat.

Sejak era kolonialisme belanda kurang lebih tiga setengah abad politik sudah berlaku dan dijalankan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan era kolonialisme belanda yang berlangsung lama menimbulkan implikasi yang serius bagi masyarakat Indonesia. Setelah era kolonialisme berakhir tahun 1945 indonesia merdeka kepemimpinan dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin di era presiden soekarno. Periode kepemimpinan presiden soekarno pada tahun 1967 dan digantikan rezim presiden soeharto dengan kepemimpinan otoriter dan jauh dari nilai-nilai demokrasi. Dengan kekuasaan terpusat menjadikan pemerintah lokal untuk membangun daerahnya secara mandiri. Pasca berakhirnya kepemimpinan presiden soeharto ditetapkan desentralisasi yang berarti bahwa distribusi kekuasaan dari pusat ke daerah. Terjadinya perubahan tersebut membuka peluang bagi penguasa lokal untuk memperoleh kesempatan dan menangkap jabatan-jabatan dan masuk ke lembaga Negara (Harriss:2005).

Pasca orde baru merupakan keran pembuka politik lokal dalam masyarakat Indonesia. Kemunculan berbagai partai politik berkembang hebat. Elite ekonomi tingkat lokal dan nasional menemukan ruang kebebasan untuk mengembangkan kemampuan berpolityanya. Politik lokal dan nasional melibatkan diri dalam pemerintahan menggunakan kewenangannya untuk mengontrol dan melindungi sumber daya yang ada di daerah (Imam:2007). Pada era reformasi muncul berbagai partai politik, partai politik adalah organisasi public yang memiliki tujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkingkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Kemunculan berbagai partai politik ini memberikan kenyataan bahwa kepentingan politik kolektif yang membutuhkan sistem organisasi-birokratif yang menjamin efisiensi dan efektifitas dalam perjuangan politik (Firmanzah, 2011:75).

Setelah gejolak politik orde baru dan pergantian reformasi politik islam menjadi basis perkembangan perpolitikan di Indonesia. geliat politik islam lokal di beberapa daerah di Indonesia menjadi penting untuk dilihat. Politik islam menjadi tonggak pembaharuan dan kebangkitan dari masyarakat islam. Kebijakan baru yang memberikan aturan bahwa pemerintahan politik lokal mempunyai hak untuk mengatur daerahnya

masing-masing memberikan peluang bagi daerahnya untuk mengatur daerahnya sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakatnya.

Kacamata politik islam lokal di berbagai daerah tidak bisa lepas dari unsur etnis, budaya, adat dan sosial masyarakat. oleh sebab itu melihat gerak politik islam lokal dengan mempertahankan lokalitas daerah menjadi ciri khas birokrasi tersebut dalam menjalankan pemerintahan dan langkah untuk mengambil kebijakan di daerah. Di kediri dengan unsur lokal masyarakat kediri yang “*tidak keagetan*” menjadikan politik islam di kediri yang santai dan tenang dalam menghadapi perubahan rezim. Di Sumenep dengan falsafah “*bhuppa’, bhabu’, guru, rato*” (Zahid, 2020:141-158). menjadikan politik islam di Sumenep yang menghormati Kiai dan penguasa sehingga kepemimpinannya memiliki relasi antara kiai dan bupati. Di Aceh setelah berpuluh-puluh tahun konflik dengan RI menghasilkan penandatanganan MoU pemerintah Indonesia memberikan kebijakan daerah aceh untuk mendirikan Politik Lokal sehingga hal tersebut menjadikan politik islam di aceh yang kental akan keislaman. Beberapa contoh kasus politik lokal diatas menggambarkan bahwa di Indonesia memiliki politik islam dengan geliatnya di ranah daerah yang mempertahankan kelokalitasannya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan pustaka mengenai politik islam di beberapa daerah di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998-2021. Penelitian ini dilakukan di 3 daerah di Indonesia yakni Kediri, Sumenep dan Aceh. Metode dalam pengumpulan data di kediri dengan melakukan wawancara kepada aktivis politik dan akademisi bapak Taufik alamin dan bu trimurti ningtyas dan buku catatan anggota Depag kabupaten kediri bapak masyhuri. Sedangkan di sumenep melakukan wawancara dengan wartawan radar madura dan studi kepustakaan buku A. Dardiri Zubairi selaku aktivis. Di aceh proses pengambilan data dengan studi literatur berbagai buku dan jurnal tentang politik Islam di aceh.

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di kediri, aceh dan sumenep karena ketiga daerah diatas mempunyai sistem politik islam yang dominan dan berjalan hingga saat ini. Kediri, Aceh, dan Sumenep menjalankan politik islam tidak lepas dari kondisi sosial, budaya, etnis dan ekonomi masyarakat sehingga terbentuklah sistem politik islam lokal yang tampil dengan lokalitasnya. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang keadaan politik islam lokal di daerah kediri, aceh dan sumenep dari rezim ke rezim dan

melihat pola perubahan sistem politik islam lokal. Peneliti menggunakan multi perspektif baik sejarah, sosiologi, filsafat, ekonomi dalam menjelaskan tentang politik islam lokal di daerah.

## **Hasil Penelitian**

### **A. Politik Islam di Kediri**

Kediri dapat dikatakan sebagai wilayah yang meliputi zona hijau(islam) dan zona merah (nasionalis) oleh karena itu politik islam yang ada di kediri di warnai dengan keislaman tapi tidak terlepas dari sisi nasionalis oleh masyarakat di kediri. Kediri merupakan wilayah yang luas dimana wujud keislaman sangat nampak dan dibuktikan dengan banyaknya kiai atau tokoh agama sebagai seseorang yang di taati oleh masyarakat.

Pada tahun 1998 terjadi banyak gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tidak stabilnya politik, keadaan negara yang kacau balau dan hal tersebut menimbulkan kerisauan dalam masyarakat. Pada orde baru masyarakat terbiasa dengan kepemimpinan yang otoriter dan semua hal yang diatur oleh negara dan pemerintah. Akan tetapi pada tahun 1998 presiden soeharto di kudeta dan kepemimpinan orde baru berubah menjadi reformasi, hal tersebut membuat ketegangan di dalam masyarakat dan menyebabkan perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan hal yang terjadi pada setiap kehidupan masyarakat. Perubahan sosial dapat berupa perubahan cepat atau perubahan lambat. Terjadinya perubahan-perubahan tersebut menyebabkan pengaruh yang luas. Perubahan sosial masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola perilaku masyarakat, susunan kelembagaan, lapisan-lapisan masyarakat, interaksi sosial, dan lain sebagainya (Soekanto, 1994:259). Perubahan sosial yang disebabkan oleh pergantian rezim menyebabkan Ketegangan terjadi di seluruh wilayah indonesia dalam berbagai sektor mulai dari politik, agama, budaya sehingga memunculkan kerusuhan di berbagai daerah.

Kasus yang menjadi keresahan skala nasional yakni kasus yang menyinggung persoalan agama. Salah satu kasus kekerasan agama yang terjadi di solo. Pasca orde baru munculnya gerakan-gerakan baru karena reformasi dan kebebasan sehingga masyarakat berlomba-lomba. Di solo munculnya gerakan yang dianggap radikalisme oleh masyarakat islam. Gerakan tersebut melakukan aksi dakwah melalui radio propaganda abc. Dalam radio ini mengandung pembicaraan kritik yang keras tentang pembersihan tauhid dari segala politeisme dan pentingnya pembersihan tauhid dari segala politeisme dan pentingnya penegakan hukum islam melalui program radio ini mereka mendapatkan

banyak pengikut di Solo. Hal tersebut menyebabkan kerusuhan dan munculnya teroris dimana-mana. Polisi mencari masyarakat yang diduga teroris untuk ditangkap dan dilenyapkan. Maraknya islamisasi di daerah-daerah Indonesia tidak hanya terjadi di Solo saja namun di daerah lain (Munghis, 2015:15).

Dalam jurnal yang berjudul radikalisme islam di Indonesia pasca reformasi juga menulis tentang perkembangan dan pertumbuhan gerakan radikalisme di Indonesia hal ini disebabkan karena pergantian rezim sehingga masyarakat maskin terbuka leh karena itu memunculkan gerakan radikalisme islam seperti JI laskar jihat, laskar Junululloh, FPI, MMI, HTI merupakan dampak dari tumbangnya orde baru dengan tumbangnya orde baru maka kelompo tersebut bebas menyuarakan aspirasi dan mengembangkan ajarannya (Mughis:18). Radikalisme yang telah berkembang di Indonesia merupakan respon dari eberapa bentuk tatanan Negara yang dianggap menyimpang dari agama islam. Radikalisme dianggap sebagai perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai dan ajaran islam. Namun dalam beberapa kasus di Indonesia radikalisme menggunakan aksi yang frontal dan keras (Hilmy, 2015:411).

Selain keran politik yang semakin terbuka hal ini dikaitkan juga dengan melemahnya kondisi Negara. Serangkaian peristiwa kekerasan dan konflik bernuansa agama muncul yakni peristiwa bom di Jakarta tahun 2000 dan bali 1 tahun 2002 juga mewarnai era reformasi. Hal ini membuktikan bahwa de legitimasi kekuasaan Negara memberikan ruang bagi gerakan bermunculkan yang di prakasai oleh aktor non Negara.

Jaminan demokrasi sebagai tempat untuk memberikan ruang partisipatif bagi kelompok masyarakat untuk menyampaikan kepentingannya. Dengan motto semua warga Negara memiliki hal yang sama untuk berpendapat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. kelompok radikal merasa diuntungkan dengan adanya kebebasan berpendapat menjadikan meraka memiliki ruang gerak yang luas. Oleh karena itu merekajuga mengambil tindakan terhadap sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Mereka menunjukkannya melalui keengganan mereka berjuang melalui sistem parpol. Mereka menolak untuk bergabung dalam sistem partai politik. Program mereka tidak disalurkan melalui jalur politik formal melainkan melalui media sosial masyarakat. dalam menjalankan aksi amar makruf nahi unkar mereka tidak segan melakukan kekerasan seperti penyisiran tepat hiburan. Hal tersebut dikatakan sebagai penegakan syariat islam. Kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di berbagai daerah tersebut juga menjadi konsen penting bagi pemerintah dan masyarakat kediri.

Setelah terdengar berbagai kasus yang terjadi di kota-kota diatas pemerintah kota kediri melakukan antisipasi dengan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan perwakilan masyarakat beragama di kediri. pertemuan tersebut di adakan karena antisipasi kerusuhan akan merembet dan menjadikan kediri sebagai sasaran kerusuhan. Pertemuan tersebut diagendakan setelah walikota mas'ud dilantik dan membentuk kelompok dialog antar agama di kediri kota dan kediri kabupaten. Dalam kegiatan tersebut pemuka agama Kristen, katolik, hindu, budha, tionghoa, islam dan kepercayaan berkumpul untuk bermusyawarah tentang kerukunan beragama di kediri kota dan kediri kabupaten.

Gejolak ramainya radikalisme masuk dan terorisme ramai dimana-mana tidak membuat pemerintah kediri, tokoh agama dan masyarakat kediri ikut-ikutan karena kediri memiliki sistem dan pola masyarakat yang tidak kaget atau terbiasa dengan hal-hal seperti perbedaan agama dan keyakinan. Respon dan keadaan masyarakat kediri yang seperti ini tidak bisa lepas dari pemikiran dan budaya masyarakat kediri. dalam prinsip hidup masyarakat kediri memiliki akar kerukunan, tidak tergesa-gesa dalam bertindak dan menghormati perbedaan hal tersebut tidak muncul secara tiba-tiba namun sudah mengakar dalam prinsip hidup masyarakat kediri sehingga apapun gelombang yang terjadi di manapun masyarakat kediri dapat mengatasi dengan tenang dan aman.

Strategi koordinasi pemerintah tokoh agama dan masyarakat beragama agar tidak terjadi kekerasan beragama. Setelah terjadi kerusuhan di kota-kota besar dan pemerintah kediri kabupaten dan kediri kota melakukan respon terhadap kejadian tersebut banyak strategi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, tokoh agama dan masyarakat beragama agar tidak terjadi kerusuhan beragama. Strategi yang pertama adalah pasca reformasi tahun 1998 menjadi titik balik bagi pemerintahan di Indonesia tidak pula bagi pemerintah kediri. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan beragama dan ramainya radikalisme di kediri pemerintah mengadakan pertemuan dengan pemuka agama. Kediri terkenal dengan pluralism dan keberagaman agamanya. Masyarakat kediri mayoritas menganut agama Islam, adapula masyarakat agama katolik, hindu, budha, Kristen, Penganut kepercayaan lokal dan masyarakat tionghoa tersebar. Pemerintah mendatangi tokoh-tokoh agama untuk melakukan pendekatan dan memberikan arahan bahwa tidak ada kerusuhan dan tidak ada konflik beragama di kediri sehingga tokoh agama dapat menenangkan dan memberikan arahan kepada pemeluk-pemeluk agama.

Selanjutnya setelah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama pada tahun 1999 pemerintah kediri membentuk paguyuban antar umat beragama dengan motto “Kediri Guyub Rukun”. Hal ini merupakan langkah lanjutan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan wujud kerukunan beragama di kediri agar tidak terjadi kerusuhan antar umat beragama. Paguyuban Antar Umat Beragama memiliki visi misi “Kediri Guyub Rukun” dan kediri tidak ada konflik antar agama. Untuk melanjutkan PAUB membentuk Anggota yang diprakarsai oleh kiai Anwar Iskandar, Pak Amin Junaidi dll. Anggotanya yakni dari Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Tionghoa dan kepercayaan lokal total ada 7 penganut agama dan kepercayaan bergabung. Fungsi dari PAUB ini adalah menjelaskan menjabarkan tentang agama masing-masing, perbedaan batas-batas keragaman keagamaan dan membentuk dialog antar agama hal tersebut untuk mencerminkan masyarakat kediri yang selalu toleransi.

Selanjutnya melakukan pawai keliling pusat kediri. Pawai tersebut dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dengan alasan diadakan agar penganut agama-agama di kediri tetap tentram, aman damai dan tidak terjadi permusuhan. Dalam pawai tersebut didiri oleh walikota, tokoh agama, masyarakat pemeluk agama dan dilakukan dengan aman dan damai. Selanjutnya adalah koordinasi penting yang ada di kediri yakni adanya pemerintah, tokoh agama dan pengusaha di kediri melakukan sinergitas pembangunan sistem politik di kediri. pemerintah disini memiliki fungsi untuk mengatur birokrasi di pemerintahan poros kota dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan serta menjembatani kepentingan-kepentingan agar berjalan dengan baik dan selaras dengan undang-undang. Sedangkan tokoh agama disini untuk membantu pemerintah dan masyarakat agar aspirasi serta dialog dan keinginan pemeluk-pemeluk agama dapat tersampaikan dan tokoh agama sebagai media dakwah karena yang dapat menyentuh langsung ke pemeluk agama adalah tokoh agama. Pengusaha disini adalah sumber dana yang dimiliki langsung oleh masyarakat dan pemerintah. Pengusaha di kediri terdiri banyak dari masyarakat Suku Tionghoa karena di kediri mayoritas penggerak ekonomi adalah masyarakat suku tionghoa. Pasca 1998 terdapat protes kebencian terhadap suku tionghoa akan tetapi di kediri hal tersebut tidak menjadi masalah akan tetapi malah membuat masyarakat tionghoa menjadi menyatu dengan masyarakat karena perannya untuk menjaga kerukunan beragama.

Yang terakhir adalah kondisi kediri yang di kelilingi oleh *pagar* pondok pesantren. Tidak bisa di pungkiri pondok pesantren merupakan identitas kediri. Pondok pesantren

sebagai media dakwah dan pembelajaran agama islam dalam masalah aqidah dan syariah mempunyai kiprah di kalangan masyarakat. masyarakat melakukan segala kegiatan dan aktivitasnya, menumbuhkan kesadaran beragama dan melaksanakan ajaran-ajaran agama sebagai pemeluk agama islam tak ayal jika pondok pesantren mempunyai peran besar bagi masyarakat di kediri (Bahari, 2003:38). Banyak pondok pesantren tua yang berada di kediri dan menjadi akar penguat masyarakat dan birokrasi di kediri. Disini kiai dan pondok pesantren memiliki peran dalam proses peredaman konflik antar umat beragama seperti contoh kiai anwar iskandar sebagai bapak kerukunan beragama di kediri beliau di pondok pesantrennya memberikan ceramah tentang kerukunan antar umat beragama dan menjelaskan bahwa pluralitas ada dalam kehidupan. Akan tetapi tidak itu saja beliau juga selalu mendatangi langsung proses pembangunan tempat ibadah agama agama katolik, hindu, budha, Kristen dan turut membantu hal tersebut merupakan contoh langsung yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Dalam hal pendidikan pondok pesantren lirboyo, wahidiyah, LDII, juga mengajarkan ajaran untuk menghormati umat beragama oleh karena itu pondok pesantren merupakan salah satu hal yang penting dalam meredam konflik antar agama.

Birokrasi politik lokal pasca 1998 di kediri juga mengalami gejolak. Akan tetapi tidak mempengaruhi dan menjadikan konflik politik baru dalam masyarakat karena adanya strategi dan sinergitas yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat kediri. Politik di kediri lebih condong ke arah politik islam, karena mayoritas masyarakat kediri beragama islam dan kediri banyak pondok pesantren dan bisa disebut juga dengan kota santri. Kediri didominasi dengan agama islam sehingga hampir seluruh elemen politik di kediri merupakan politik islam. Akan tetapi walaupun mayoritas dominasi islam kelompok agama lain tetap bisa berpolitik dengan bebas kelompok agama hidup lestari dan hidup berdampingan dengan aman.

Politik islam di kediri seiring dengan perkembangan keagamaan di kediri dan kejadian-kejadian pasca orde baru memunculkan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang agama. Hal ini merupakan langkah awal politik islam di kediri yakni membuat kebijakan-kebijakan tentang agama seperti membentuk dialog antar agama, membuat PAUB dan mendampingi tokoh-tokoh agama dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.

Pemerintah membuat kebijakan tidak serta merta akan tetapi melihat keadaan dari bawah yakni dari sisi masyarakat. Masyarakat kediri adalah basis kehidupan masyarakat islam sehingga kebijakan kepentingan masyarakat islam dipertimbangkan dalam



perkembangan politik islam di kediri. Pada pemerintahan di kediri banyak kebijakan seperti kebijakan pemerintah tentang kebebasan beribadah aliran LDII. Pemerintah memberikan kebebasan kelompok agama LDII untuk mengadakan pengajian dan agama serta aliran lain untuk ikut toleransi karena di kediri LDII(wali barokah) memiliki pondok dan pengikut yang besar. LDII juga ikut membantu pemerintah dalam mengembangkan perekonomian daerah karena memiliki banyak toko-toko yang berada di kediri. begitupun dengan aliran lain seperti wahidiyah saat mengadakan mujahadah kubro hingga menutup jalan wahid hasyim di Bandar pemerintah memberikan kebebasan dan anggota kelompok beragama lain ikut mengamankan.

Dengan banyaknya pondok pesantren di kediri peran kiai pondok juga besar. Peran organisasi NU dan Muhammadiyah juga besar dalam perpolitikan di kediri. dalam pemilihan walikota menggunakan agama sebagai alat politik dan untuk mencari massa. Contohnya saat pemilihan walikota abubakar dan ning lik pak abu berasal dari organisasi muhammadiyah sedangkan ning lik berasal dari organisasi NU. Keseimbangan pemilihan walikota untuk memperkuat calon dan mengimbangi massa MU dan NU untuk mencari suara. Pondok pesantren lewat maklumat kiai juga di praktikkan dalam pemilihan seperti pada saat pemilihan presiden jokowi dan makruf amin pondok pesantren lirboyo mengeluarkan maklumat untuk memilih jokowi dan KH ma'ruf amin hal tersebut membuktikan bahwa kiai memiliki peran penting dalam politik islam di kediri.

## **B. Politik Islam Sumenep**

Politik agama dan etnis madura merupakan satuan politik yang menjadi karakteristik politik islam di madura. Masyarakat madura memiliki falsafah hidup "*bbuppa', bhabu', guru, rato*" yang memiliki arti (bapak, ibu, guru(kiai), penguasa) hal tersebut dinyatakan sebagai falsafah kearifan lokal masyarakat madura. Kearifan ini memiliki makna hirarkis yang menjelaskan bahwa ada empat pihak yang harus di hormati oleh masyarakat Madura.

Falsafah hidup diatas membentuk politik islam di madura yang tidak bisa lepas dari peran penting *guru/kiai* di ranah politik madura. Kiai adalah guru yang di hormati oleh masyarakat madura sehingga apa yang diajarkan dan diucapkan oleh kiai akan di taati oleh masyarakat. Pada era orde baru madura adalah daerah yang menjadi tempat partai PPP (Zubairi, 2020:112). Kiai-kiai juga dilibatkan dan menjadi penyumbang suara

yang besar bagi politik islam di kabupaten sumenep. Kiai-kiai di Madura mengalami intimidasi terutama pada tahun 1977 dan 1982. Seperti aparat yang berkeliaran di rumah para kiai, dipanggil ke Koramil, dan bahkan banyak yang ditahan. Kenapa,? Karena peran politik kiai pada masa itu sangatlah nyentrik dan berbahaya bagi penguasa di era Orde Baru. Masyarakat di Pulau garam sangat percaya dengan apa yang dikatakan para kiai, oleh karena itu pada saat orde baru kiai menjadi ancaman politik dan sasaran pemerintah.

Setelah rezim orde baru berakhir pada tahun 1999 indonesia mengalami perubahan sisem politik nasional dan mempengaruhi sistem politik lokal di setiap daerah. Sejak era reformasi, peran para kiai mulai berubah dari yang dulu pernah di kesampingkan menjadi sangat penting. Bukan hanya saja sebagai politisi aktif, baik anggota legislatif bahkan ada yang menjadi bupati. Lebih-lebih di Madura dimana posisi dan peran kiai sangat penting dalam segenap siklus kehidupan masyarakat Madura. Karena kiai bagi orang Madura itu adalah raja setelah penguasa.

Contohnya di Sumenep, empat periode terhitung sejak era reformasi kepemimpinannya dipegang kiai. Di Pamekasan 3 kali berganti-ganti tetap semuanya masih kiai. Di sampang pernah satu kali menyicipi dipimpin kiai. Sedangkan Bangkalan sama seperti Sumenep. Walaupun berada dalam satu pulau kebijakan tentang kepemimpinan kiai di empat kabupaten memiliki kebijakan yang berbeda-beda, karena tergantung posisi konteks sosial-politik di wilayah tersebut.

Politik etnis madura yang berkembang dengan mengedapankan kiai dalam peran di masyarakatnya teradaptasikan di kabupaten sumenep dalam pemerintahan pasca 1998-saat ini. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga tidak terlepas dari kepentingan masyarakat. namun yang menjad iproblem yakni ketika guru (kiai) yang menjabat menjadi rato(penguasa/bupati) dalam masyarakat akan menimbulkan kebingungan karena menjadi guru sekaligus rato akan memerankan dua peran satu sisi harus memerankan sebagai guru dan satu sisi sebagai penguasa. Harusnya domain hirarkis yang sakral saat terjadi dua peran politik dengan kekuatan sosial politik menjadikan sifatnya menjadi profan (Zubairu, 2020:113).

Dalam periode kepemimpinan bupati KH Ramdhan Siraj pada tahun 2006-2008 politik islam di praktikkan oleh bupati sumenep. Kebijakan yang diambil oleh bupati sumenep dengan perancangan APBD untuk menggratiskan SPP anak sekolah. Namun tidak terjadi begitu saja hal ini terjadi karena sekelompok pemuda NU yang tergabung

dalam Lakpesdam NU melakukan advokasi pro poor budget APBD yang berpihak kepada masyarakat miskin. Mereka memfalisitasi dilaksanakannya pelatihan membaca dan membedah APBD. Kelanjutannya APBD di bacakan dalam seminar, hearing ke DPRD dan Dipublikasikan melalui media (Zubairi, 2020).

Pada periode KH Busryo Karim terjadilah kritisasi kebijakan pemda yang dianggap merugikan masyarakat pesisir selatan dan utara sumenep karena adanya akuisisi lahan. Oleh karena itu santri dan LBM PCNU membahas persoalan akuisisi lahan dalam *batsbul masail* MWC NU. Tidak hanya berhenti disana MWC NU mengadakan istighasah agar akuisisi lahan tidak dilanjutkan dan tidak berkembang luas karena merugikan masyarakat pesisir. Dalam kepemimpinan bupati Achmad Fauzi dan dewi khalifah tahun 2021 agak sedikit berganti bupati bukan seorang kiai namun wakil bupatinya adalah seorang nyai. Janji politik yakni melaksanakan program pembangunan daerah sumenep dengan motto *sumenep melayani* yang di tebarkan kepada masyarakat mampu menyentuh dinding kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat memilihnya menjadi bupati.

### **C. Politik Islam di Aceh**

Aceh merupakan daerah yang tidak bisa lepas dari agama islam, agama islam yang berkembang di masyarakat aceh sangat kental dan masuk ke dalam adat dan kebudayaan dan keseharian masyarakat aceh. Bentuk geografi aceh yang subur dan tanah yang mudah di tanami menjadikan aceh sebagai daerah yang mampu menghasilkan bermacam-macam sumber daya alam. Aceh merupakan salah satu provinsi di inonesia yang erhasil dalam menentang kekuasaan belanda dan portugis. Keberhasilan dan kemampuannya dibuktikan dengan ketidakmampuan belanda untuk memiliki control penuh dalam masa penjajahan Indonesia di wilayah aceh. Idenititas masyarakat aceh yang kental akan keislamannya sehingga aceh memiliki identitas sebagai serambi mekah.

Dalam perkembangan politik islam di aceh tidak bisa lepas dari konflik yang berkepanjangan dengan pergantian era kepemimpinan presiden Indonesia. Setelah kemerdekaan tahun 1945 muncul konflik antara RI dan Aceh sehingga menimbulkan kasus kekerasan, pelecehan seksual hingga HAM. Pada periode soeharto juga terjadi hal yang sama karena ketidakpuasan masyarakat karena keinginan terkait pemulihan pelaksanaan syariat islam sebagai kekuatan sosial politik masyarakat aceh tidak dipenuhi. Keadaan mulai memanas dan muncul Gerakan Aceh Merdeka hingga di jaga ketat oleh tentara selama satu dekade.

Kepemimpinan soeharto yang otoriter membuat masyarakat aceh resah dan kecewa. Setelah pelengseran presiden soeharto dan reformasi di Indonesia. Presiden habibi membuat kebijakan baru untuk masyarakat aceh yakni keputusan akan penerapan syariat islam di aceh untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat aceh (Ilyas, 2008:357). Setelah konflik antara GAM dan Indonesia sekian lama sampai tanggal 15 agustus tahun 2005 terlaksanalah perdamaian antara aceh dan RI. Hal tersebut menjadi titik balik berkembangnya politik islam di aceh dan peran masyarakat aceh dalam pemilihan presiden Indonesia.

Dalam praktik politik islam di aceh dalam pemilihan umum, pada tahun 2007 dan 2008 berbagai partai politik tersebar di aceh. Masyarakat aceh mulai di persiapkan dan diberikan wawasan untuk pemilihan umum tahun 2009. Beberapa partai yang masuk dalam pemilihan umum di aceh tahun 2009 diantaranya Partai SIRA, partai democrat, partai aceh, partai keadilan sejahtera, partai amanat nasional, partai golkar dan partai lokal lainnya (Hadiwinata, 2010:157-158). kegiatan tersebut menjadi ajang yang penting bagi partai politik untuk melebarkan sayap dan mencari suara politik baru. Begitupun bagi masyarakat aceh menjadi tempat untuk mempraktikkan demokrasi serta menyampaikan pendapat dan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kepentingan kelompok, masyarakat agar di sampaikan dalam proses pembuatan kebijakan dan proses politik di aceh.

Pemerintahan di aceh tingkat provinsi, kabupaten,kecamatan dan desa namun di aceh memiliki penamaan yang berbeda yakni *gampong* (desa) dikepalai oleh kepala desa dan dusun (khusus di daerah pedesaan) dan kepala lingkungan oleh kepala lorong khusus daerah perkotaan (Umar, 2002:3-4). Namun selain pemerintahan formal adapula pemerintahan informal yang menjadi panutan masyarakat aceh yakni seperti *tuba pent tuba lapan* kepemimpinan tersebut terdiri dari imam masjid, khatib,bilal,*teungku sagoe* , masyarakat yang cerdas dan pintar. Setiap masyarakat aceh di daerah perkempungannya terdapat *meunasah* yakni tempat pendidikan atau disebut madrasah (Azmiati:2011). Masyarakat aceh yang dikenal dengan taat kepada leluhur budaya dan syariat islam yang melekat mempunyai peninggalan kalimat yang menjadi falsafah hidup “*adat bak po teumeurubom, hukom bak syiah kualah, kanun bak putroe phang, reusam bak lakseumana*” dimana menerapkan hukum sesuai dengan ajaran islam dan taat kepada allah.

Politik islam di aceh memiliki hak istimewa dari pemerintah repoublik Indonesia. Provinsi aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki wewenang untuk

membentuk partai politik lokal setelah diadakannya MoU Helsinki dan UU No,11/2006 tentang pemerintahan aceh (UUPA) dan PP No.20/2007 tentang partai politik lokal di aceh (Nur, 2014:78-79). Setelah adanya penandatanganan MoU (memorandum of understanding) antara GAM dan Pemerintah Indonesia membuahkan hasil yang baik bagi masyarakat aceh. Penandatanganan Mou mengakhiri konflik yang ada pada masyarakat aceh dan menciptakan perdamaian. Hal ini membuat peluang pagi berkembangnya politik lokal dan demokrasi pada masyarakat aceh (Zulkhairi:175). Oleh karena itu pada pemerintahan aceh memiliki dua partai yang berkembang di masyarakat yakni Partai Nasional dan Partai Lokal.

Geliat politik partai nasional sejak pemilu tahun 1955 dimana terdapat pemilihan umum. Sejak pemilihan umum tahun 1955-2009 Indonesia mengalami perkembangan sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari daftar partai politik yang terdaftar di KPU seluruh Indonesia. Proses pemilu yang diadakan dari tahun 1955 sampai 2014 merupakan bentuk pemilihan demokrasi dimana puncak demokrasi yakni pada tahun 1999 memberikan kesempatan bagi partai politik baru untuk ikut dan menunjukkan kualitasnya kepada masyarakat Indonesia. Pada pemilihan uum tahun 2014 terdapat pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dimana keikutsertaan partai nasional sebanyak 12 partai dan partai lokal 3 partai ikut andil dalam pesta demokrasi (Nur, 2014:191).

Sedangkan geliat partai politik lokal juga mewarnai proses politik islam di Aceh sesuai dengan perjanjian MoU ada banyak partai lokal pada pemilu 2009 yang tercatat untuk mengikuti pemilihan umum namun partai tersebut kuran diminati oleh masyarakat aceh karena memiliki suara yang kurang. Namun ada 3 partai yang masih berjalan dan eksis di dunia politik dam membawa perwalikan aceh ke DPR. Berikut daftar nama partai politik lokal di aceh tahun 2009 yakni Partai Aceh Aman Sejahterra(PAAS), Partai Daulat Aceh(PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh(SIRA), Partai Rakyat Aceh(PRA), Partai Aceh(PA) dan Partai Bersatu Aceh(PBA). Sedangkan partai yang masih eksis sampai saat ini ada 3 partai yakni Partai Aceh, Partai Nasional Aceh dan Partai Daulat Aceh (Nur:201I).

Peran partai politik di aceh tidak bisa lepas dari perjanjian MoU yang telah disepakati sehingga partai politik lokal dan partai politik nasional memiliki ruang yang sama untuk melaksanakan demokrasi. Partai politik lokal di aceh memiliki sitem politik tertutup dan tidak memiliki wewenang untuk masuk ke dalam pemilihan umum nasional.

Hal tersebut telah diatur dalam pasal 1 huruf I dan pasal 80 ayat 1 huruf b undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh membatasi keikutsertaan partai politik lokal do aceh hanya dalam lingkup pemilihan lokal yakni dalam pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah (UU No 11 Tahun 2006).

### **Kesimpulan**

Fenomena pergerakan politik islam lokal di Indonesia mulai muncul pada era reformasi. Kemunculan politik Islam merupakan hasil dari terombang ambingnya hubungan antara islam dan kepemimpinan Negara yang otoriter pada era orde baru. Politik islam menjadi tonggak pergerakan masyarakat islam dalam mendirikan sitem politik sesuai dengan ajaran islam. Gerakan politik islam lokal di beberapa daerah di Indonesia merupakan respon dari terjadinya perubahan rezim dari orde baru ke reformasi. Kebangkitan ditandai dengan munculnya beragai partai politik islam di Indonesia. Selain politik islam yang berkembang adapula radikalisme yang merupakan respon dari porak-porandanya tatanan Negara yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran islam.

Namun beberapa kasus di Indonesia seperti di Solo, Jawa Barat dan Bali menggunakan kekerasan hingga menimbulkan aksi yang radikal dan keras. Politik islam di Kediri merupakan respon dari reformasi kota dan kabupaten kediri yang mayoritas masyarakatnya islam menggunakan model politik yang mengedepankan toleransi dan menyatukan kerukunan beragama. Sedangkan aksi radikalisme dihantam oleh masyarakat dan pemerintah kediri dengan model masyarakat kediri yang *tidak keagetan* karena perbedaan agama dan keyakinan sudah biasa bagi masyarakat kediri. sedangkan di sumenep model politiknya menggunakan hierarkis falsafah *guru rato* dari periode ke periode bupati adalah seorang kiai. Masyarakat sumenep menghormati kiai karena kiai merupakan simbol agama. Kebijakan yang diambil oleh bupati juga sesuai dengan aksi dan kebutuhan masyarakat. sedangkan di aceh menggunakan politik lokal karena aceh diberikan kewenangan untuk membentuk partai lokal setelah MoU dan praktik politik lokal sesuai ajaran agama Islam.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Mughis. (2015). *Politik Islam Dan Kekerasan Agama Di Indonesia Pasca Orde Baru*. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, Vol. 20, No.1, Januari.
- Alwahadi Ilyas. (2008). Aceh Serambi Mekkah. Banda Aceh:Pemerintah Prov NAD.

Basri M Nur. (2014). *Parnas vs Parlok: Pertarungan Partai Politik dalam Menguasai Aceh*. Banda Aceh: GAMNA Publishing.

Bob Sugeng Hadiwinata dkk (2010) *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka: Dari Kotak Peluru ke Kotak Suara*. Jakarta Selatan: Friedrich Ebert Stiftung.

Ghazali M.Bahri. (2003). *Pesantren Bermawasan Lingkungan*. Jakarta:Prasasti.

Masdar Hilmy. (2015). *Radikalisme Agama Dan Politik Demokrasi*. MIQOT Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember

Muhammad Umar (2002)*Darah dan Jiwa Aceh Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: CV. Boebon Jaya.

Nur Azmiati, *Perkembangan Politik Aceh Pasca Konflik* (Aceh:Uin Ar Raniry,2014)

Prof. Firmanzah, Ph. D. (2011). *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sidel, John T.(2005). “*Bosisme dan Demokrasi Di Filipina, Thailand Dan Indonesia; Menuju Kerangka Analisis Baru Tentang “Orang Kuat Lokal”*”, Dalam John Harriss (Ed), *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*. Jakarta:Demos.

Soerjono Soekanto. (1994). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Teuku Zulhairi. *Suara Rakyat Aceh*. Banda Aceh: Gamma.

Zamroni Imam.(2007). *Juragan, Kiai dan Politik Lokal di Madura*. UNISLA, Vol. XXX No. 65 September 2007.

Zubairi A.Dardiri. (2020). *Wajah Islam Madura*. Jakarta Barat:Tarebooks.

Website dan Undang-Undang

Zahid, A. (2020). DAMPAK GLOBALISASI DAN PERAN SOSOK KIYAI DI SUMENEP (Kajian Kritis Anthony Giddens pada Peran Kiyai di Sumenep, Madura). *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(2), 141-158.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan\\_Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Aceh) diakses pada tanggal 22 Juni 2021

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 18

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).